

PERBATASAN PAPUA-PAPUA NUGINI: DENGAN ATAU TANPA PANDEMI COVID-19

Melyana Ratana Pugu¹, Yanyan Mochamad Yani²

¹Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih

²Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

puguratana@yahoo.com

yan2m@hotmail.com

Abstract

This research aims to provide an analysis of the condition of the Papua-Papua New Guinea border during the Covid-19 pandemic and the period of no pandemic. What are the efforts of the government and the governments of the bordering countries in dealing with the maslaah border during the covid-19 pandemic. The method used in this study is qualitative descriptive research that seeks to provide in-depth picture and analysis based on the author's observations directly as well as through library studies. The results or externality of this study are the papuan border of Khsusunya on the border of Skouw-Vanimu and Arso Timur-Weam, as well as Sota-PNG under close guard by the state during the Covid-19 pandemic by the two-state army apparatus. Papua New Guinea has first closed its border area in Papua. The economic and social activities of both countries are disrupted by the closure of the border doors of the two countries. On the other hand, border areas that do not have cross-border outposts are only closely guarded by the TNI and PNGDF (PNG Defense force) forces.

Keywords; Covid-19, Borders, Papua, Papua New Guinea.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan analisa kondisi perbatasan Papua-Papua Nugini dimasa pandemic Covid-19 dan masa tidak ada pandemic. Apa saja upaya-upaya pemerintah dan pemerintah negara yang berbatasan dalam menangani maslaah perbatasan dimasa pandemic covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif qualitative yang berupaya memebrikan gambaran dan Analisa mendalam berdasarkan pengamatan penulis secara langsung maupun melalui studi pustaka. Hasil atau luaran dari penelitian ini adalah perbatasan Papua khsusunya di perbatasan Skouw-Vanimu dan Arso Timur-Weam, maupun Sota-PNG di jaga secara ketat oleh negara pada masa pandemic Covid-19 oleh aparat tentara dua negara. Papua Nugini telah terlebih dahulu menutup wilayah perbatasannya di Papua. Aktivitas ekonomi dan social kedua masyarakat negara terganggu oleh adanya penutupan pintu perbatasan kedua negara. Disisi lain, wilayah perbatasan yang tidak memiliki pos lintas batas hanya dijaga oleh aparat TNI maupun PNGDF (PNG Defense force) secara ketat.

Kata kunci; Covid-19, Perbatasan, Papua, Papua Nugini.

1. Pendahuluan

Perbatasan setiap negara didunia selalu memiliki karakteristik dan model yang berbeda-beda baik secara geografis maupun dalam tata kelola perbatasannya. Hal ini menjadikan isu perbatasan negara menjadi menarik untuk dikaji dan dianalisis. Demikian juga halnya perbatasan khususnya perbatasan darat yang ada di Indonesia. Perbatasan darat di Indonesia ada di beberapa wilayah antara lain di Provinsi Papua, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur.

Perbatasan darat Indonesia di Provinsi Papua terdapat di beberapa kabupaten yaitu di Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digul dan Kota Jayapura yang panjangnya dari utara ke selatan sepanjang 820 Km². Keadaan perbatasan di lima kabupaten ini dapat digambarkan sebagai perbatasan tradisional yaitu tanpa pos perbatasan yang resmi dan hanya di jaga oleh aparat keamanan kecuali perbatasan Skouw di Kota Jayapura yang telah ada Pos Lintas Batas Nasional (PLBN) yang baru saja diresmikan pada tahun 2017 yang lalu.

Masalah yang sering dihadapi di wilayah perbatasan antar negara adalah masalah keamanan yang berkaitan dengan batas negara, masalah yang berkaitan dengan penyelundupan dan penjualan barang-barang illegal seperti penjualan narkoba dan obat-obatan, *illegal logging*, *illegal fishing*, *money laundering*, *human trafficking*, *arms smuggling* yang semuanya dilakukan melalui jalur perbatasan darat dan laut antar negara. Tidak hanya lintas batas manusia dan barang tetapi juga masalah penyakit menular turut memberikan warna dalam masalah perbatasan dalam beberapa bulan belakangan ini akibat pandemic Covid-19.

Di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini terdapat masalah pelintas batas tradisional dan masalah keamanan yang menjadi masalah atau mengancam kedaulatan negara. Bahwa perbatasan Indonesia dan Papua Nugini yang panjangnya

dari utara Jayapura ke selatan Merauke adalah 820 Km² memiliki masalah pelintas batas tradisional karena penduduk dua negara yang berbatasan adalah keluarga dan kerabat yang terpisah akibat pembagian wilayah koloni oleh negara jajahan Inggris dan Belanda tanggal 16 Mei 1895 di Haque yang dikenal dengan *Convention between great Britain and Netherland defining boundaries in New Guinea*. Saat ini terdapat batas dua negara berupa tugu batas bernama Meridian Monument (MM) sebanyak 52 pilar batas dibangun atas kesepakatan kedua negara, dimana 24 tugu pemeliharaan tanggung jawab Indonesia dan sisanya 28 tugu menjadi tanggung jawab Papua Nugini ; 14 pilar batas utama dibangun sejak tahun 1966-1967 dan 38 pilar batas sekunder dibangun 1982-1990. Dalam perkembangannya, masalah pelintas batas tradisional tetap menjadi persoalan dua negara akibat pos pelintas batas belum lengkap di setiap wilayah perbatasan dua negara kecuali wilayah perbatasan di Skouw Jayapura. Sebaliknya di semua wilayah Papua Nugini yang berbatasan dengan Papua pun belum dibangun pos lintas batas sehingga sebagian besar wilayah perbatasan dua negara ini hanya ada pos-pos keamanan.

Tulisan ini hendak menganalisa masalah perbatasan khususnya dimasa pandemic covid-19 di wilayah perbatasan Papua dengan Papua Nugini serta upaya-upaya apa yang dilakukan kedua negara di perbatasan pada masa pandemi.

Beberapa konsep yang dapat digunakan untuk memahami perbatasan dan pandemic adalah menurut World Health Organization (WHO) Pandemi Covid-19 telah menjadi masalah serius semua negara di dunia dan harus menjadi perhatian bersama semua negara di dunia dengan jumlah kasus sampai dengan 17/10/2020 adalah 39,633,376 dimana 1,109,834 meninggal dunia dan yang sembuh sebanyak 29,678,446 diseluruh dunia (worldmeter.com). WHO dalam rilisnya tidak menganjurkan negara-negara melakukan *lockdown* perbatasan negaranya karena akan mengganggu stabilitas ekonomi dan

mengakibatkan meningkatnya penduduk miskin dunia dan juga tidak menganjurkan penerapan herd immunity oleh negara-negara didunia seperti dikatakan Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization, Dr. David Nabarro bahwa tindakan pembatasan hanya cara upaya terakhir. Dengan begitu pihaknya tidak menganjurkan penguncian sebagai cara utama pengendalian virus Covid-19 (<https://www.suara.com/health/2020/10/13/204614/who-lockdown-wilayah-upaya-terakhir-pengendalian-covid-19>). "Satu-satunya kami yakin bahwa penguncian dapat dibenarkan adalah untuk memberi Anda waktu mengatur ulang, menyusun kembali, menyeimbangkan kembali sumber daya Anda, melindungi petugas kesehatan Anda yang kelelahan. Tetapi umumnya, kami tidak menganjurkannya," ujar Nabarro seperti dilansir dari New York Post, Selasa (13/10/2020). Lebih lanjut, menurutnya, terdapat kerugian signifikan yang disebabkan oleh lockdown yang ketat, khususnya terhadap ekonomi global. "Lockdown hanya memiliki satu konsekuensi yang tidak boleh Anda remehkan, dan itu membuat orang miskin menjadi semakin miskin," kata dia.

Selain WHO, juga ada pendapat UNDP (United Nations Development Programme) bahwa COVID-19 akan menimbulkan kemunduran besar dalam penanganan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan, serta membuat banyak warga sebagai contoh di Afrika Selatan bahwa masyarakat Afrika Selatan terperosok dari kelas menengah ke bawah garis kemiskinan, disebut dalam Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dalam sebuah penelitian dampak sosial ekonomi COVID-19 di Afrika Selatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa 34 persen rumah tangga kemungkinan terperosok dari kelas menengah masuk ke dalam kondisi rentan. "Meskipun dana perlindungan sosial pemerintah cenderung menysasar warga paling miskin, penelitian ini mengasumsikan fakta bahwa kebutuhan dukungan dan perawatan harus diberikan kepada mereka yang berada di

ambang batas garis kemiskinan, seperti warga kelas menengah yang rentan, guna memperkecil kemungkinan mereka terperosok dalam kemiskinan," ujar Koordinator Residen PBB Nardos Bekele-Thomas. UNDP menyampaikan bahwa 54 persen rumah tangga yang terpaksa tersingkir dari status pekerjaan tetap dan masuk dalam kontrak pekerjaan informal atau sementara kemungkinan akan jatuh dalam kemiskinan setelah paket stimulus enam bulan selesai (<https://www.msn.com/id-id/berita/other/undp-covid-19-akan-perburuk-kemiskinan-dan-kesenjangan-di-afrika-selatan/ar-BB18nCpz>).

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Sabtu (17/10) mengatakan dunia gagal menghadapi ujian pandemi virus corona. Guterres memperingatkan pentingnya aksi bersama untuk mencegah jutaan orang di dunia jatuh ke dalam kemiskinan dan kelaparan. Mantan Perdana Menteri Portugis itu mengatakan, akan lebih banyak yang dapat dilakukan bila negara-negara bersatu untuk memerangi wabah yang telah menewaskan lebih dari satu juta orang itu. "Pandemi COVID-19 adalah tantangan global utama bagi seluruh komunitas internasional, untuk multilateralisme dan bagi saya, sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Guterres kepada kantor berita Portugis Lusa, seperti dikutip dari Reuters. "Sayangnya ini adalah ujian yang sejauh ini gagal dilakukan oleh komunitas internasional," lanjutnya. Guterres juga mengkritik negara-negara yang kurang bersatu dalam menangani tantangan global lainnya seperti konflik di Afghanistan, Yaman dan Suriah. "Itu adalah sumber frustrasi yang sangat besar," katanya. Hingga kini lebih dari 39 juta orang telah terinfeksi COVID-19 di seluruh dunia. Kasus kematian akibat COVID-19 telah mencapai lebih dari 1 juta orang. Corona telah menginfeksi lebih dari 210 negara, sejak pertama kali diidentifikasi di China pada Desember 2019. Di Indonesia kasus infeksi virus corona sebanyak 361.867 dengan 12.511 kematian

(<https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/sekjen-pbb-dunia-gagal-hadapi-covid-19/ar-BB1a8JbJ?ocid=spartan-dhp-feeds>).

Pendapat WHO dan UNDP diatas menjadi kontra ketika dikaitkan dengan konsep kedaulatan dalam hubungan internasional. Menurut Cristina Badescu kedaulatan adalah pilar fundamental dari sistem internasional karena negara bangsa masih tetap menjadi aktor penting dalam masyarakat global. Hal ini juga di dukung oleh pendapat Thomas Diez yang mengatakan bahwa kedaulatan merupakan otoritas tertinggi dari sebuah entitas politik terhadap urusan-urusannya sendiri termasuk hak suatu negara atas wilayah tertentu dan diakui secara eksternal. Demikian juga Peter menegaskan bahwa sebuah negara yang berdaulat memiliki otoritas final dalam urusan-urusan dalam negerinya (Peter Hagel, 2016). Makna dari konsep yang ditawarkan para ahli diatas adalah bahwa ditengah pandemic covid-19 ini otoritas negara tetap lebih tinggi dari apapun dan negara manapun atau pihak manapun tidak dapat melakukan intervensi terhadap wilayah negara baik keadaan ekonomi dan social dari masyarakat dalam wilayah tersebut.

2. Discussion

2.1. Elemen Perbatasan Negara

Dalam perbatasan negara setiap wilayah terdapat elemen-elemen perbatasan antara lain elemen internal perbatasan dan elemen eksternal perbatasan. Yang disebut sebagai elemen internal perbatasan adalah : (a). Masyarakat Perbatasan; (b) Petugas Perbatasan; (c) Pemerintah Daerah setempat; (d) Pemerintah Pusat.

Masyarakat perbatasan adalah orang asli wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, yang telah lama mendiami wilayah perbatasan sejak lahir hingga turun temurun dan atau penduduk yang telah menjadi bagian

dari wilayah tersebut sejak waktu yang lama. Masyarakat perbatasan ini biasanya memiliki hubungan kekerabatan dengan masyarakat atau penduduk yang berbatasan wilayah negara yang ditandai dengan hubungan kekeluargaan, kesamaan suku, ras dan adat istiadat.

Petugas perbatasan adalah elemen perbatasan karena petugas perbatasan adalah mereka yang karena tugas negara ditempatkan untuk menjaga dan mengurus serta mengawasi perpindahan manusia dan barang di wilayah perbatasan. Petugas perbatasan adalah petugas keamanan atau security yaitu tentara, petugas imigrasi, petugas bea cukai dan petugas karantina. Tugas mereka adalah menempati pos-pos perbatasan yang telah disediakan oleh pemerintah dan menjalankan tugas-tugas diperbatasan. Misalnya Tentara bertugas menjaga wilayah perbatasan aman dari kejahatan lintas batas; petugas Imigrasi mencatat perpindahan manusia dari wilayah perbatasan maupun yang masuk wilayah negara dari negara lain melalui perbatasan; petugas bea cukai mencatat dan mengecek barang-barang yang masuk dan keluar melalui wilayah perbatasan dengan ketentuan biaya yang telah ditetapkan oleh negara; petugas Karantina mencatat dan mengecek kesehatan manusia yang masuk maupun keluar perbatasan, mengecek tumbuhan dan hewan yang melalui pintu perbatasan.

Pemerintah daerah adalah perangkat daerah yaitu Gubernur, DPRD, Bupati/walikota, kepala distrik dan kepala kampung beserta jajarannya yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain. Pemerintah daerah bertugas merencanakan pembangunan wilayah perbatasan, melaksanakan pembangunan wilayah perbatasan, memonitoring dan mengevaluasi jalannya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara berjenjang dan berkordinasi termasuk dengan pemerintah pusat.

Pemerintah Pusat adalah Presiden, Menteri-Menteri dan instansi kelembagaan negara termasuk DPR yang bertugas merencanakan, melaksanakan, berkoordinasi dan monitoring serta evaluasi jalannya pemerintahan daerah dengan wilayah perbatasan negara termasuk berkoordinasi dengan negara yang berbatasan wilayah.

Sedangkan Elemen eksternal perbatasan adalah pemimpin negara-negara yang berbatasan langsung dan atau komite kerjasama dua negara yang telah dibentuk oleh negara untuk mengurus wilayah perbatasan mereka. Misalnya Indonesia dan Papua Nugini didalamnya ada pemimpin dua negara dan Komite Kerjasama RI-PNG atau Joint Border Committee RI-PNG yang telah dibentuk sejak tahun 1985 oleh dua negara ini.

Berdasarkan uraian diatas maka di Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom yang berbatasan dengan Papua Nugini, elemen perbatasan negara yang aktif adalah petugas keamanan atau tentara/TNI. Petugas lainnya belum aktif atau tersedia karena belum adanya pos lintas batas negara di wilayah tersebut. Hal ini mengakibatkan aktivitas masyarakat sebagai pelintas batas tradisional hanya di periksa oleh petugas tentara saja. Akibat lokasi perbatasan yang jauh dari wilayah ibukota kabupaten sehingga menyulitkan pemerintah daerah setempat seperti badan perbatasan dan instansi terkait untuk dapat melakukan koordinasi dan komunikasi secara baik. Peran pemerintah pusat juga belum maksimal dalam koordinasi secara berjenjang dengan pemerintah daerah perbatasan.

Dimasa pandemic covid-19 ini, aktivitas lintas batas tradisional masyarakat perbatasan distrik ini tetap berjalan seperti biasa. Karena masyarakat distrik ini seperti di Kampung Kibay dan kampung Yetty sebagai kampung perbatasan yang terdekat dengan Papua Nugini tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Pelintas batas tradisional di kampung-kampung batas ini tetap dilakukan tanpa

pemeriksaan karena memang tidak tersedia pos lintas batas. Sebenarnya pemerintah telah membangun pos lintas batas di Kampung Yetty sejak tahun 2009 namun sampai saat ini tidak terpakai bahkan sudah rusak dan ditumbuhi belukar akibat tidak diurus. Hal ini sempat ditanyakan penulis kepada kepala badan pengelolaan dan kerja sama luar negeri Provinsi Papua ibu Suzana Wanggai dan dikatakan bahwa karena letak pos perbatasan yang sangat jauh dari perbatasan negara dengan PNG sehingga dipikirkan untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih dekat.

2.2. *Border Diplomacy* RI dimasa Pandemic

Border Diplomacy atau diplomasi perbatasan merupakan pelaksanaan politik luar negeri RI dalam rangka penanganan masalah perbatasan yang mencakup penetapan batas wilayah negara serta pengelolaan wilayah perbatasan dan kerjasama internasional dalam upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. *Border diplomacy* Indonesia di perbatasan RI-PNG rutin melakukan pertemuan dengan PNG dan membicarakan agenda-agenda terkait permasalahan batas negara dan masalah perbatasan dua negara baik dua pemimpin negara ini maupun oleh Menteri luar negeri dua negara. Hubungan luar negeri RI-PNG telah ada sejak tahun 1982 dengan ditandatanganinya *Basic Agreement* oleh Indonesia dan Papua Nugini. Dalam kaitannya dengan diplomasi perbatasan yang dilakukan pemerintah Indonesia salah satunya adalah mengeluarkan Peraturan Menkumham Nomor 11 tahun 2020 berlaku 2 april 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk ke wilayah Indonesia sehingga semua perbatasan Indonesia dengan negara lain di tutup sepanjang masa pandemic covid-19. Yang unik adalah sebelum perbatasan Papua ditutup, negara tetangga Papua Nugini telah terlebih dahulu menutup wilayah perbatasannya sejak 30 Januari 2020

sementara perbatasan Papua Indonesia baru ditutup di awal Maret 2020.

2.3.Dampak Pandemic terhadap Perbatasan Negara

Pandemic Covid-19 yang melanda seluruh wilayah didunia telah memberikan dampak bagi perbatasan negara-negara yang secara otomatis menutup diri dari aktivitas dan mobilitas warga dunia dengan menutup perbatasan negaranya. Hal ini dilakukan dengan tujuan melindungi warga negaranya dari penularan covid-19 yang dapat berpindah sesuai aktivitas manusia dan barang. Hal utama yang dilakukan setelah penutupan batasnya adalah memperketat keamanan perbatasan negaranya.

Hal tersebut diatas mengakibatkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat terganggu; contohnya: di Perbatasan Merauke, masyarakat tidak bisa mencari ikan ke laut karena di Pos Torasi dijaga ketat oleh aparat keamanan dua negara; Pos PLBN Skouw yang menghubungkan perbatasan Kota Jayapura dengan Vanimo Papua Nugini juga ditutup mengakibatkan tidak ada aktivitas lintas batas dan ekonomi yang dilakukan warga perbatasan ini; di perbatasan Sota Merauke juga di tutup berdasarkan peraturan bupati dan UU No.11/2020 Menkumham tentang pelarangan orang asing masuk wilayah negara RI. Batas kota dan kabupaten juga ada wacana dibatasi pergerakannya. Tentu saja pandemic memberikan dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat perbatasan dua negara karena lumpuhnya aktivitas ekonomi dan social di wilayah perbatasan dua negara.

Disi lain, pandemic ini memberikan dampak menguatnya identitas bangsa karena semua warga masyarakat di wilayah perbatasan akan menghindari bertemu dan berkontak dengan orang asing akibat mencegah tertularnya pandemi covid 19 ini. Masing-masing pemerintah negara akan

sangat melindungi warganya agar tidak tertular virus ini. Di perbatasan negara seperti yang dilakukan Papua Nugini yang telah lebih awal menutup perbatasannya terhadap Indonesia menunjukkan bahwa wilayah ini juga tidak ingin warganya tertular virus ini melalui perbatasannya dengan Indonesia. Hal ini terlihat dari perbandingan jumlah pasien covid-19 di Papua Nugini per tanggal 17/10/2020 yaitu terdapat 578 kasus dimana 7 orang meninggal, sembuh 537 dan positive dirawat 34 orang. Sedangkan di Indonesia pertanggal yang sama total kasus 357,762 dimana 12,431 meninggal, sembuh 281,592 dan positive dirawat 63,739 (worldmeters.com).

2.4.Penanganan Pandemic di Perbatasan Papua

Dimasa pandemic Covid-19 ini berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menjaga kedaulatan dan pertumbuhan ekonomi negaranya. Di wilayah perbatasan Papua-Papua Nugini, pemerintah menutup perbatasan negara. Yang ada hanya petugas penjaga perbatasan negara/tentara. Tata laksana penanganan pandemic di wilayah ini hanya dilakukan di puskesmas terdekat perbatasan dengan alat-alat atau fasilitas kesehatan yang seadanya. Hal ini menunjukkan betapa tata kelola perbatasan di wilayah perbatasan Papua-Papua Nugini masih sangat rendah dan lemah dalam memberikan pelayanan dan standar perlindungan yang baik bagi warga negaranya. Misalnya di wilayah perbatasan di Arso Timur, tidak terdapat Puskesmas yang dekat dengan perbatasan ini. Letak Puskesmas ada di ibukota distrik yang jaraknya jauh dari kampung-kampung perbatasan. Selain letaknyanya yang jauh juga tidak dilengkapi dengan jumlah perawat atau dokter yang memadai. Akibatnya pelayanan terganggu dan masyarakat terabaikan.

3. Conclusion

Pada masa Pandemi Covid-19, penjagaan ketat pos lintas batas di wilayah perbatasan RI-PNG, tidak ada aktivitas lintas batas,

pembagian sembako oleh masing-masing pemerintah daerah, penutupan PLBN. Aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat terganggu. RI dan PNG perlu memberi perhatian serius terkait masalah penyebaran virus dan prosedur dan standar penanganannya. Perlunya peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan beserta sarana prasarana pendukung untuk meminimalisir penyebaran virus di perbatasan. Tanpa Pandemi; penjagaan ketat pos lintas batas, ada aktivitas lintas batas, kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat 2 negara berlangsung;

Perlunya penguatan kapasitas petugas perbatasan (CIQS-Customs, Imigrasi, Quarantine and Security) dan pembangunan sarana pos lintas batas, sarana kesehatan dan pasar perbatasan yang memadai bagi masyarakat perbatasan di perbatasan Papua-Papua Nugini. Pentingnya peran masyarakat adat perbatasan guna meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di perbatasan. Selain itu di level negara, perlunya koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang efektif oleh RI-PNG sebagai negara yang berbatasan termasuk memperhatikan trend isu perbatasan terkait pandemic.

Tabel Virus yang pernah ada dalam catatan sejarah

Abad/tahun	Nama Virus/ Penyakit Menular	Dari negara	Korban jiwa	Melalui
Abad 14	Penyakit Pes (Black Death)	Eropa ke negara Eropa, Asia, Afrika utara	75-200 juta jiwa	Kapal dagang dan armada koloni
1492	Typhus, Flu, Cacar, Campak	Eropa ke Amerika	80-95% penduduk asli Amerika usnah	Armada koloni Coltan bus
1520	Penyakit (smallpox)	Spanyol ke Mexico	22 juta penduduk Mexico suku maya dan astec menjadi korban 15 juta jiwa penduduk menjadi 1,5 juta jiwa	Armada kapal yang membawa tentara Spanyol ke Mexico
1950	Flu Asia	Asia	2 juta jiwa orang Asia	
1968	Flu Hongkong	Hongkong dan Asia	1-4 juta jiwa orang Hongkong dan Asia	
2003	Flu Burung		453 jiwa	
2002	Flu Babi		18.000-150.000 jiwa	
2002	SARS		753 jiwa	
2012	MERS		990 jiwa	
2016	Ebola		11 ribu jiwa	
1980-sekarang	AIDS		30 juta jiwa	
2019-2020	Corona Diseases: Covid-19	Wuhan ke seluruh dunia 213 negara terkena virus ini.	4.556.956 positif; Meninggal 304.201 jiwa; Sembuh 1.5/5/20	Perpindahan penduduk dunia

Sumber: Olahan data Pribadi, 2020.

Daftar Pustaka

Evarukdijati. (2020). Antisipasi virus corona, PNG tutup perbatasan. *AntaraNews.Com*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/1284706/antisipasi-virus-corona-png-tutup-perbatasan>

Idhom, A. om. (2020). Update Corona 3 April 2020: Data Covid-19 Terbaru Indonesia & Dunia. *Tirto.Id*. Retrieved from <https://tirto.id/update-corona-3-april-2020-data-covid-19-terbaru-indonesia-dunia-eKE7>

Marwasta, D. (2016). PENDAMPINGAN PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN DI INDONESIA: LESSON LEARNED DARI KKN-PPM UGM DI KAWASAN PERBATASAN. *Indonesian Journal of Community Engagement, 01(02)*.

Reuters. (2020). AS akan Tambah 500 Pasukan di Perbatasan Meksiko Untuk Cegah Covid-19. *IMCNews.Id*. Retrieved from <https://imcnews.id/as-akan-tambah-500-pasukan-di-perbatasan-meksiko-untuk-cegah-covid-19>

Sejarawan, E. S. (2020). Globalisasi Virus dan Jejak Peradaban. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/read/detail/29149-0-globalisasi-virus-dan-jejak-peradaban>

<https://www.suara.com/health/2020/10/13/204614/who-lockdown-wilayah-upaya-terakhir-pengendalian-covid-19>

<https://www.msn.com/id-id/berita/other/undp-covid-19-akan-perburuk-kemiskinan-dan-kesenjangan-di-afrika-selatan/ar-BB18nCpz>).

<https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/sekjen-pbb-dunia-gagal-hadapi-covid-19/ar-BB1a8JbJ?ocid=spartan-dhp-feeds>).

Worldmeters.com 17102020